SYAIKH ALI BELHAJ

(Tokoh FIS Aljazair)

MENGHANCURKAN DEMOKRASI

Judul Asli : *Ad Damghah Al Qawwiyah li Nasfi Aqidah Ad Dimuqrathiyah*

Penulis : Syaikh Ali Belhaj

Penerbit : Darul ‘Uqab, Libanon, Beirut. PO Box 113/5974

Penerjemah : Muhammad Shiddiq Al Jawi

Pembahasan dalam buku ini pernah dipublikasikan dalam *Al Munqidz*, harian resmi FIS (*Front Islamic du Salut*) di Aljazair pada edisi nomor 24 dan 25 yang terbit pada tanggal 2 dan 16 Shafar 1411 H/1992 M.

PENGANTAR PENERBIT EDISI BAHASA ARAB

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah berfirman dalam kitab-Nya yang mulia :

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Maidah [5] : 50)

Pada saat demokrasi yang kufur menyerang negeri-negeri kita, pada saat sebagian orang yang rendah taraf berpikir dan moralitasnya menyambut gembira demokrasi, termasuk juga di dalamnya orang yang tersesat dan menyerah kalah di hadapan peradaban Barat, bangkitlah di antara kaum muslimin para tokoh panutan dan pemikir besar untuk menyingkapkan cacat, kepalsuan, dan kontradiksi demokrasi dengan Islam, baik dari segi asas maupun cabangnya. Para pemikir besar tersebut terus bergerak melawan arus yang sangat deras yang mendominasi negeri-negeri kita, Mereka terus melawan orang-orang yang menyerukan demokrasi sebagai solusi masalah kaum muslimin. Para pemikir itu bertindak laksana orang yang khawatir kambingnya diterkam serigala. Mereka tak peduli dengan semua resiko yang akan dihadapinya, yang terkadang mengancam mata pencaharian dan keluarga mereka. Mereka berani mengucapkan perkataan yang haq. Mereka tidak akan takut karena Allah SWT akan celaan dari orang-orang yang suka mencela.

Dari sekian banyak tokoh terkemuka yang membongkar kebusukan demokrasi dan produk hukum kafir yang lahir darinya, salah satunya adalah Syaikh Ali Belhaj, penulis kitab ini yang telah menghabiskan hari-harinya dalam penjara demokrasi (!) yang dimiliki oleh kaum demokrat (!), hanya karena beliau menghendaki Islam menjadi pemimpin sekaligus hakim kehidupan, serta menghendaki kemuliaan kaum Muslim.

Semoga Allah SWT membalas amal shaleh penulis dengan segala kebaikan karena perjuangannya membela kita dan kaum muslimin. Kita pun berharap semoga Allah segera melepaskannya dari kesulitan-kesulitan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari buku yang amat berharga ini.

Samir Az-Zain
(Darul 'Uqab)

DAFTAR ISI

STANDAR KEBENARAN DEMOKRASI : SUARA MAYORITAS

Dari sekian sebab yang mendorong kita untuk menolak demokrasi adalah karena demokrasi itu tegak di atas suara mayoritas, tanpa melihat lagi jenis suara mayoritas yang ada. Jadi standar kebenaran dalam demokrasi ditentukan oleh pendapat mayoritas.

Berangkat dari prinsip ini, para pemimpin partai yang berhaluan demokrasi selalu berupaya mencari keridhaan mayoritas rakyat dengan segala cara, walaupun harus mengorbankan aqidah, harga diri, agama, dan kehormatan. Mereka melakukan semua ini untuk dapat meraih suara mayoritas rakyat tersebut dalam kompetisi-kompetisi pemilu yang beraneka ragam.

Kebenaran Tidak Ditentukan Oleh Banyaknya Pelakunya, Tetapi Oleh Dalil-Dalil Syar'i

Sebagai pengikut *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, kita memandang bahwa kebenaran hanya ditentukan melalui dalil-dali syara' (Al-Qur`an dan As-Sunnah serta yang ditunjukkan oleh keduanya-penerj.), bukan dari banyaknya orang yang mengerjakannya atau suara mayoritas rakyat.

Dengan demikian, kita bisa melihat, pengikut para rasul jumlahnya sangat sedikit sedangkan para pengikut *thaghut* jumlahnya sangat banyak.

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman kepada Nuh AS setelah tinggal bersama kaumnya selama satu milenium kurang lima puluh tahun (950 tahun). Firman Allah SWT :

" Dan tidak beriman kepada Nuh, kecuali sedikit." (QS Huud [11] : 40)

Demikian pula Fir'aun –*laknatullah*-- saat akan menganiaya sahabat-sahabat Nabi Musa, Fir'aun menyifati mereka dengan berkata :

"(Fir'aun berkata), 'Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil." (QS Asy-Syu'araa` [26] : 54)

Namun Allah mencela mayoritas yang telah mengantarkan Fir'aun menjadi penguasa absolut. Firman Allah SWT :

"Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik." (QS Az-Zukhruf [43] : 54)

Kalau kita mau merenungi firman Allah maka kita akan melihat, acapkali Allah mengaitkan jumlah mayoritas dengan celaan (*adz-dzam*) dan jumlah minoritas dengan pujian (*al-madh*). Firman Allah :

"Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." (QS. Yusuf [12] : 21, 40, 68), (QS. Al-A'raaf [7] : 87), (QS. An-Nahl [16] : 38), (QS.Saba` [34] : 28,36), (QS. Al-Mu`min [40] : 57), (QS. Al-Jaatsiyah [45] : 26)

"Dan kebanyakan dari mereka adalah kafir." (QS An-Nahl [16] : 83)

"Bahkan dari sebagian besar dari mereka tidak beriman." (QS.Al-Baqarah [2] : 100)

"*Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya(nya)."* (QS. Al-Israa` [17] : 89), (QS. Al-Furqaan [25] : 50)

"Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran."(QS. Al-Mu`minun [23] : 70)

"Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri-(Nya)." (QS.Yusuf [12] : 38)

"Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (QS.Al-Maa`idah [5] : 49)

"Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram." (QS.Al-Maa`idah [5] : 62)

"Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (QS.Al-An'aam [6] : 37)

“Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Al-An’aam [6] : 111)

“Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur (ta’at).” (QS. Al-A’raaf [7] : 17)

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.” (QS. Yunus [10] : 36)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.” (QS.Yunus [10] : 92)

“Tetapi kebanyakan dari manusia tidak beriman.” (QS. Huud [11] : 17)

“Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam mempersekutukan Allah (dengan sesembahan lain).” (QS. Yusuf [12] : 106)

“Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia.” (QS. Ibrahim [14] : 36)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain.” (QS. Shaad [38] : 24)

Allah SWT memberi peringatan kepada Rasulullah SAW agar jangan mengikuti kebanyakan orang yang tidak mengetahui. Firman Allah SWT :

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu.” (QS. Al-An’aam [6] : 116)

“Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan.” (QS. Al-An’aam [6] : 119)

Sebaliknya, ketika Allah berbicara mengenai jumlah yang sedikit biasanya disertai dengan pujian (*al-madh*). Seperti firman Allah SWT :

"Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari pada kamu, dan kamu selalu berpaling." (QS. Al-Baqarah [2} : 83)

"Dan mereka berkata,'Hati kami tertutup,' tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka, maka sedikit sekali mereka beriman." (QS. Al-Baqarah [2] : 88)

"Maka tatkala perang diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka." (QS. Al-Baqarah [2] : 246)

"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah." (QS.Al-Baqarah [2] : 249)

"Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka,'Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu,' niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka." (QS. An-Nisaa` [4] : 66)

"Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)."(QS.Al A'raaf [7] : 3)

"(Tetapi) kamu sedikit sekali kamu bersyukur." (QS. As-Sajdah [32] : 9)

Firman Allah SWT tatkala menceritakan kisah Iblis :

"(Dan iblis berkata),'Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya akan aku sesatkan anak keturunannya, kecuali sebagian kecil." (QS.Al Israa` [17] : 62)

"Dan mereka tidak mendatangai peperangan kecuali sebentar." (QS.Al-Ahzab [33] : 18)

"Dan sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang kecuali sebentar saja." (QS. Al-Ahzab [33] : 20)

"Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih." (QS.Saba` [34] : 13)

Allah SWT juga menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan perbaikan (*ishlah*) di tengah-tengah manusia yang melakukan kerusakan, sedangkan jumlah mereka sedikit. Firman Allah SWT :

"Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan di antara mereka." (QS. Huud [11] : 116)

Bahkan puluhan hadits telah mambicarakan jumlah sedikit dengan pujian (*al-madh*) sedang mereka melakukan perbaikan. Rasulullah SAW bersabda:

"Tak henti-hentinya satu kelompok dari umatku selalu menampakkan kebenaran (al-haq). Tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencela dan menyalahi mereka hingga datang pertolongan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Para ulama banyak membahas keutamaan orang-orang yang terasingkan (*al ghuraba`*) yang melakukan perbaikan di tengah–tengah manusia yang berbuat kerusakan, seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hanbaly dalam kitabnya *Kasyf Al-Kurbati Biwashfi Ahl Al-Ghurbati***.**

Demokrasi Memberikan Hak Membuat Hukum Kepada Suara Mayoritas

'Adnan 'Aly Ridha An-Nahwy telah mengatakan dalam kitabnya *Syura Laa Ad-Dimuqrathiyah* halaman 103 :

“Dalam kehidupan dunia, kebenaran (pendapat) tidaklah diukur dan ditetapkan oleh sedikit atau banyaknya jumlah orang yang melakukannya. Tetapi kebenaran itu harus diukur dan ditetapkan oleh kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan manhaj rabbani yang diturunkan dari langit. Firman Allah SWT :

“Sesungguhnya (Al-Qur`an) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.” (QS.Huud [11] : 17)

Selanjutnya ‘Adnan ‘Aly Ridha An-Nahwy berkata :

“Kebenaran bukan ditetapkan oleh suara mayoritas, sekalipun yang menang tersebut kaum muslimin. Juga, ukuran kebenaran bukan ditentukan oleh kongres atau parlemen yang mengacungkan dan menurunkan tangan berdasarkan hawa nafsu yang mengakibatkan kehancuran bangsa tersebut. Islam telah memiliki manhaj rabbani, satunya-satunya pelindung bagi manusia walau dalam keadaan berbeda dan saling silang pendapat.”

Dari sinilah, maka para shalaf ash-shaleh tatkala menafsirkan kata *al-jama’ah* –yang termaktub dalam hadits Nabi SAW-- dengan makna konsisten (*iltizaam*) dalam kebenaran (*al-haq*) walau Anda seorang diri.

Abu Syamah berkata dalam kitabnya *Al-Baa’its* halaman 22 :

“Ketika datang perintah untuk menetapi jama’ah, yang dimaksud adalah tetap konsisten dalam kebenaran (*al-haq*) dan selalu mengikutinya, walaupun orang yang berpegang teguh pada kebenaran sangat sedikit dan para penentangnya sangat banyak. Karena kebenaran (*al-haq*) itulah yang dipegang oleh jama’ah yang pertama, yaitu Rasulullah SAW dan para shahabat RA, tanpa melihat lagi banyaknya pengikut kebatilan.”

Tatkala Abdullah bin Mubarak ditanyakan kepadanya mengenai maksud dari kata *al-jama’ah*, beliau menjawab,”Abu Bakar dan ‘Umar.” Lalu beliau ditanya lagi seandainya keduanya telah wafat, beliau menjawab,”Si Fulan dan si Fulan.”

Kemudian ditanyakan lagi kepadanya seandainya si Fulan dan si Fulan wafat. Beliau menjawab."Abu Hamzah Al-'Askary itulah jama'ah."

Imam Al-Bukhari menafsirkan kata *al-jama'ah* dengan makna orang yang pakar dalam fiqh (*ahl al-fiqh*) dan ulama (*ahl al 'ilm*). Beliau berkata dalam Bab [Demikianlah Allah menjadikan kalian umat yang adil (*ummatan wasathan*)], "Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti *jama'ah*, maksudnya adalah mengikuti *ahlul 'ilmi*."

Imam At-Tirmidzi berkata mengenai tafsir dari kata jama'ah :

"Menurut ahlul 'ilmi yang dimaksud dari kata jama'ah adalah ulama yang memiliki kedalaman ilmu (*ahl al 'ilm*), pakar dalam fiqh (*ahl al fiqh*), dan pakar dalam hadits (*ahl al hadits*)".

Ibnu Sinan menafsirkan *al-jama'ah* adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu (*ahl al 'ilm*) dan para ahli hadits (a*sh-haabul atsar*).

Walaupun ulama berbeda pendapat mengenai tafsir dari kata *al-jama'ah* tetapi mereka semua kembali pada makna yang satu, yaitu siapa saja yang meneladani keadaan dan hal ihwal Rasulullah dan para sahabat. Sama saja apakah jumlah mereka sedikit ataupun banyak, walaupun umat berbeda-beda dalam kondisi, tempat dan zamannya. Karena itu Abdullah bin Mas'ud berkata mengenai kata *al-jama'ah,* "Apa saja yang sesuai dengan kebenaran (*al-haq*) walaupun Anda seorang diri." Dalam lafadz lain, *al-jama'ah* adalah "Apa saja yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah walau Anda dalam keadaan seorang diri."

Catatan :

Dalam kitab *Al-Mabaadi` Ad-Dusturiyah Al-'Ammah* halaman 304 dikatakan bahwa menurut para pemikirnya demokrasi terdiri dari tiga macam :

1. Demokrasi Langsung

Yaitu rakyat memerintah secara langsung tanpa melalui perantara berupa parlemen atau yang sejenisnya. Kemudian seluruh rakyat berkumpul dalam satu tempat untuk membuat undang-undang yang di ambil dari suara mayoritas.Untuk sekarang hal ini mustahil terjadi, dan ini merupakan awal dari munculnya ide demokrasi jenis pertama (demokrasi langsung). Demokrasi jenis ini pertama kali dipelopori oleh Jean Jacques Rousseau. Dia memandang, tidak mungkin ada

demokrasi tanpa metode seperti ini, karena demokrasi tegak di atas kehendak umum masyarakat. Kehendak umum tidak bisa terwakili dan tidak bisa diwakilkan atau diserahkan kepada pihak lain, karena kehendak umum tidak mungkin dipindahkan. Dikatakan bahwa yang seperti inilah demokrasi hakiki dimana rakyat dapat merealisasikan kedaulatannya. Dalam arti, rakyat bisa melaksakan kekuasaan secara utuh bukan setengah-setengah melalui para wakil rakyat.

2. Demokrasi Tak Langsung (Perwakilan)

Demokrasi ini berlangsung tatkala rakyat memilih para wakil-wakilnya untuk melaksanakan kekuasaan atas nama rakyat.

3. Demokrasi Semi Langsung

Demokrasi jenis ini gabungan dari dua bentuk demokrasi di atas.

KHURAFAT MAYORITAS

Secara faktual telah diketahui, rakyat sebuah bangsa tidak mungkin memerintah sendiri, tetapi memerintah melalui para wakilnya yang terwujud dalam mayoritas anggota majelis perwakilan yang telah mereka pilih.

Maka, berubahlah kehendak mayoritas (rakyat pada umumnya) menjadi kehendak minoritas (kehendak wakil rakyat). Saat itulah muncul kesewenang-wenangan/kediktatoran baru, karena kehendak rakyat beralih ke tangan orang-orang yang mereka pilih saja. Sehingga rakyat tidak mampu untuk membatalkan, menghapus, ataupun mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh para wakilnya.

Menurut banyak pakar politik, prinsip mayoritas adalah teori yang paling berbahaya terhadap berlangsungnya kebebasan individu, karena setiap perbuatan yang muncul dari orang yang terpilih dapat menjadi hukum sekaligus undang-undang hanya karena ia merupakan kehendak rakyat. Dari sini kita bisa melihat bahwa mayoritas pendapat yang ada telah berubah menjadi kesewenang-wenangan minoritas, dan fakta telah membuktikan hal itu. Oleh karena itu, seharusnyalah umat Islam menjadi umat yang bersandar pada dalil syar'i, bukan pada suara mayoritas.

Demokrasi Adalah Pemerintahan Minoritas, Bukan Pemerintahan Mayoritas Seperti Yang Digembar-Gemborkan

Kita menolak demokrasi, berbeda dengan orang kafir, berdasarkan qa'idah syar'iyah yang telah diadopsi oleh jumhur muslimin untuk berbeda dengan orang Yahudi dan Nashrani. Adapun dalil-dalil syar'i yang mengesahkan qa'idah ini begitu masyhur untuk disebutkan dan terlalu banyak untuk dibatasi. Salah satunya adalah firman Allah SWT :

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS Al-Jatsiyah [45] : 180)

Imam Ibnu Taymiyah telah menjelaskan maksud ayat tersebut secara baik di dalam kitabnya *Iqthidha` Ash-Shirat Al-Mustaqim fi Mukhalafati Ash-hab Al-Jahim* halaman 8 :

“Kemudian Allah menjadikan Rasulullah SAW berada di atas syariat-Nya dari agama itu yang telah ditetapkan-Nya bagi beliau dan Allah memerintahkan beliau agar mengikuti syariat tersebut sekaligus melarang beliau untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Pada saat itu Rasulullah tinggal bersama orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu setiap orang yang selalu menyalahi syariat beliau beliau. Hawa nafsu mereka adalah apa-apa yang mereka sukai. Penampakan dari perilaku musyrikin tersebut muncul karena mereka mengikuti agama mereka yang batil dan ajaran-ajaran lainnya. Akhirnya mereka menyukai perbuatannya tersebut. Mereka meniru Rasulullah hanya untuk mengikuti apa yang mereka senangi. Oleh karena itu kaum musyrikin dalam sebagian prilakunya senang menyamai kaum muslimin, walau harus mengeluarkan banyak harta demi tercapainya apa yang mereka inginkan itu.”

Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur`an Al-‘Azhim* juz 4 halaman 310 :

“Allah melarang kaum mukminin untuk menyerupai mereka sedikit pun baik dalam perkara ushul maupun furu’.”

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari* juz 10 halaman 298 :

“Aku telah mengumpulkan hadits yang berbicara tentang perbedaan kaum muslimin dengan Ahlul Kitab. Ternyata aku menemukan 30 hukum tentang hal itu. Lalu aku tulis dalam kitabku dengan nama *Al-Qaulu Ats-Tsabt fi Ash-Shaumi Yaum As-Sabt.*

Sayid Qutub menjelaskan dalam kitab *Fi Zhilal Qur`an* juz I halaman 127 pada masalah berbedanya kaum muslimin dalam masalah kiblat :

“Sesungguhnya kekhasan dan perbedaan dalam penampakan jati diri merupakan hal yang penting bagi kaum muslimin. Kekhasan dan perbedaan dalam penampakan jati diri dan akidah serta kekhasan dan perbedaan dalam kiblat dan ibadah haruslah berbeda dan memiliki ciri khas tertentu. Terkadang pengaruh (perbedaan) muncul demikian jelas mengenai kekhasan dalam jati diri dan akidah, terkadang pula tidak begitu jelas dalam masalah kiblat dan syiar-syiar ibadah.

Di sini perlu diperhatikan nilai dari bentuk-bentuk formalitas ibadah. Orang yang pandangannya terfokus pada bentuk-bentuk formal ini semata, yang dilepaskan dari hal-hal yang melingkupinya dan juga terlepas dari dari tabiat kemanusiaanya dan pengaruh-pengaruhnya, maka akan tampak baginya bahwa melestarikan bentuk-bentuk formal tersebut adalah suatu fanatisme sempit atau suatu penyembahan kepada formalitas. Tetapi kalau kita mau berpikir lebih luas dan dalam, maka akal sehat kita akan menyingkapkan hakikat yang lain secara gamblang…

Berdasarkan asas yang fitri inilah Islam menegakan syiar-syiar ibadahnya secara keseluruhan. Syiar-syiar ibadah itu tak cukup ditunaikan hanya dengan niat atau kekhusyuan batin (*tawajjuh ruhiyah*) semata, akan tetapi kekhusuyuan batin ini harus memiliki bentuk-bentuk zahir.

Demikianlah, dalam setiap ibadah ada gerakan dan dalam setiap gerakan ada ibadah. Ini untuk menyatukan aspek yang lahir dan batin, untuk menyelaraskan antara kekuatan lahir dan kekuatan batin, yang sesuai dengan fitrah manusia secara keseluruhan, dengan metode yang selaras dengan jati dirinya yang khusus.

Pembedaan tempat yang diarah seorang muslim dalam sholat dan ibadah dan pengkhususannya, bukanlah (semata) agar dia berbeda dan nampak secara khusus dengan jati diri, manhaj dan arahnya. Pembedaan ini, adalah untuk memenuhi panggilan perasaannya yang cenderung ingin berbeda dan bersifat unik, yang pada gilirannya akan memunculkan keistimewaan dan keunikan.

Dari sini pula ada larangan untuk menyerupai (*tasyabbuh*) orang-orang non-muslim dalam sifat-sifat khas mereka, yang merupakan ekspresi lahir dari perasaan-perasaan batiniah mereka, seperti juga larangan mengikuti metode mereka dalam perasaan dan perilaku. Ini bukanlah kefanatikan dan bukan pula berpegang dengan formalitas semata, melainkan pandangan yang mendalam mengenai bentuk-bentuk formal yang bersifat lahiriah.”

MENYALAHI ORANG YAHUDI DAN NASHRANI TERMASUK PRINSIP AGAMA KITA

Faktor-faktor (yang diterangkan Sayyid Quthub) itulah yang membedakan satu kaum dengan kaum lainnya, satu pola pikir dengan pola pikir lainnya, satu hati nurani dengan hati nurani lainnya, satu akhlak dengan akhlak lainnya, dan satu pandangan hidup dengan pandangan hidup lainnya.

Kemudian Sayyid Quthub mengungkapkan banyak hadits dalam hal menyalahi orang Yahudi dan Nashrani. Sayyid Quthub mengatakan :

"Rasulullah melarang kaum muslimin bertasyabbuh dalam pakaian dan penampilan, gerak dan tingkah laku, perkataan dan adab, karena di balik semua itu terdapat perasaan batin yang membedakan konsep, manhaj dan watak jamaah Islam dengan konsep, manhaj dan watak jamaah lainnya. Rasulullah juga melarang kaum muslimin untuk menerima (hukum/aturan/ideologi) selain dari Allah SWT. Padahal manhaj yang Allah berikan kepada umat ini adalah untuk diwujudkan di muka bumi.

Rasulullah juga melarang kita untuk mempunyai perasaan-kalah terhadap kaum lain di muka bumi, sebab perasaan-kalah terhadap suatu masyarakat akan menimbulkan kelemahan dalam jiwa yang membuat kita bertaqlid kepada masyarakat tertentu itu. Padahal seharusnyalah kaum Muslim tegak menjadi pemimpin manusia serta mengarahkan sikap taqlidnya seperti mereka mengambil akidahnya dari sumber yang mereka pilih yang memang layak untuk memimpin. Bukankah kaum Muslim umat yang paling tinggi, umat pilihan, dan sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah tengah manusia ? Lantas dari mana kaum Muslim mengambil konsep dan manhaj mereka ? Bukanlah kaum Muslim mengambilnya dari Allah sedang mereka (selain kaum Muslim) mengambil konsep dan manhaj mereka dari sesuatu yang rendah yang lalu mereka angkat tinggi-tinggi !

Jamaah kaum muslimin yang menghadap kiblat ketika sholat wajib menemukan makna dari penghadapan ini. Sesungguhnya kiblat bukanlah sekedar arah atau tempat ketika kaum Muslim sholat. Lebih dari itu, tempat atau arah tersebut tiada lain adalah simbol, yaitu simbol untuk mengkhususkan dan membedakan jati diri, kepribadian, tujuan, kepentingan dan institusi kaum Muslim dengan kaum yang lainnya.

Sabda Rasulullah SAW:

“Aku diutus menjelang Hari Kiamat dengan pedang sampai Allah disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dia menjadikan rizkiku ada di bawah bayangan tombakku. Dia menjadikan kehinaan dan kekerdilan bagi siapa saja yang menentangku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut”.(HR.Ahmad, dengan sanad hasan)

Syaikhul Islam (Ibnu Taymiyah) mengatakan dalam syarahnya mengenai hadits ini :

“Hadits tersebut paling sedikit mengandung tuntutan keharaman *tasyabbuh* kepada orang kafir. Walaupun zahir dari hadits tersebut menetapkan kufurnya bertasyabbuh dengan mereka, sebagaimana firman Allah :

“Barang siapa diantara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (QS. Al-Maa`ida [5] : 51).

Imam Ash-Shan’ani dalam kitabnya *Subulus Salam* berkata :

“Barang siapa bertasyabbuh dengan orang-orang fasik maka dia adalah bagian dari orang-orang fasik atau orang kafir atau ahli bid’ah, pada sesuatu yang menjadi ciri khas bagi mereka dalam pakaian, kendaraan, dan tingkah laku.”

(Para ulama) berkata, jika bertasyabbuh dengan orang kafir dalam pakaian dan dia beri’tiqad bahwa dengan itu dia telah menjadi serupa dengan orang kafir, maka orang itu dikafirkan. Akan tetapi jika tidak meng‘itiqadkannya, maka dalam hal ini terjadi ikhtilaf di kalangan fuqaha. Yang mengambil zahirnya hadits menyatakan kafir, sementara ulama yang lainnya mengatakan tidak sampai jatuh kafir, tetapi mendapatkan hukuman”.

Karena itulah, kita menolak demokrasi, karena demokrasi merupakan aqidah Barat yang kafir, yang kita telah diperintahkan untuk menyalahi mereka sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Pada masa sekarang, masalah ini memang membutuhkan penjelasan, karena lalainya manusia terhadap kaidah besar ini. Sebab pemraktekan demokrasi di negeri-negeri kaum Muslim sebenarnya adalah suatu perilaku mengemis-ngemis yang sangat hina lagi tercela.

Syeikh Muhammad Al-Ghazaly mengatakan dalam kitabnya *Khatbu Asy-Syeikh Muhammad Al-Ghazaly* **:**

“Telah sepakat orang-orang yang berakal sehat, bahwa manusia yang mengemis-ngemis sementara di rumahnya ada harta yang mencukupinya, maka dia adalah orang yang ganjil dan aneh tingkah lakunya. Jika dia memilih berprofesi sebagai pengemis sementara secara pasti terdapat harta yang cukup buat dirinya, maka dia adalah orang yang sakit jiwa yang patut dihukum !”

Kaidah ini sama saja berlakunya, baik untuk umat-umat dan masyarakat-masyarakat maupun untuk individu-individu dan orang-orang. Umat yang memiliki kekayaan pemikiran yang besar dan peradaban yang subur, akan dianggap umat yang aneh jika melupakan aset yang dimilikinya baik berupa sumber-sumber kekayaan materiil maupun moril, kemudian menggabungkan diri dengan Blok Timur maupun Blok Barat. Umat itu juga dianggap aneh kalau diwarnai oleh warna-warna tersebut yang terkadang bernama kanan terkadang pula bernama kiri. Padahal Allah telah memuliakannya dengan celupan (*shibgah*) yang satu. Firman Allah SWT :

“Shibghah (celupan) Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.” (QS. Al-Baqarah [2] : 138)

KESAKSIAN PARA PENGANUT DEMOKRASI

Ketika demokrasi yang kafir menyerang negeri kita dan disambut gembira oleh para intelektual yang rusak pemikirannya lagi tak bermoral, dan ketika demokrasi begitu dipuji oleh orang-orang yang sesat dan takluk di hadapan peradaban Barat, justru Anda akan melihat bahwa para ahli politik Eropa telah melancarkan kritik yang tajam terhadap demokrasi, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya oleh Plato. Di bawah ini sebagian kritikan dari mereka.

Michael Stewart dalam bukunya *Sistem-Sistem Pemerintahan Moderen* halaman 459 mengatakan :

”Kaum komunis bersikeras bahwa hukum demokrasi yang tegak di atas dasar kebebasan berkreasi, berpendapat, bertingkah laku dan berkepribadian, hanyalah sebuah prinsip yang kotor dan rusak. Mereka berargumentasi bahwa demokrasi kapitalisme telah mentolelir pengrusakan masyarakat --khususnya para pemudanya-- melalui film-film dan bioskop-bioskop serta penyebaran kemungkaran serta kekejian.”

Benjamin Constan berkata :

”Demokrasi membawa kita menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen.”

Barchmi berkata :

“Prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebenarnya tidak pernah ada, yaitu bahwa kedaulatan rakyat dianggap selalu mewujudkan kebenaran dan keadilan. Paham ini mengklaim bahwa kekuasaan menjadi legal dengan melihat sumbernya. Atas dasar ini maka setiap aspirasi yang muncul dari kehendak rakyat, dianggap telah memenuhi parameter kebenaran dan keadilan. Aspirasi rakyat itu juga dianggap tak perlu diragukan dan diperdebatkan lagi dari segi ini (memenuhi kebenaran dan keadilan-penerj.), bukan karena argumentasinya kuat, melainkan karena ia muncul dari kehendak rakyat. Jadi prinsip kedaulatan rakyat ini memberikan sifat *maksum* (mustahil keliru/dosa) kepada rakyat. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat akan

membawa rakyat (atau para wakilnya) berpeluang melahirkan kekuasaan absolut, yaitu kesewenang-wenangan (kediktatoran). Karena apabila kehendak rakyat dianggap kehendak yang legal hanya karena muncul dari rakyat, maka dengan demikian dari segi legislasi undang-undang, rakyat akan dapat berbuat apa saja. Jadi rakyat pada dasarnya tidak perlu lagi mendatangkan justifikasi-justifikasi terhadap apa yang diinginkannya."

Dougey berkata :

"Sesungguhnya teori kedaulatan rakyat, meskipun ia adalah teori buatan, ia telah menjadi teori yang layak didukung andaikata ia dapat menafsirkan hakikat-hakikat dan fakta-fakta politik pada masa modern, dan andaikata hasil-hasilnya praktisnya cukup baik. Akan tetapi kenyataannya ternyata bertolak belakang dengan apa yang kita ramalkan."

Orientalis Polandia bernama Boogena Giyanah Stchijfska mengatakan :

"Hukum-hukum positif buatan manusia yang lahir dari konsensus-konsensus demokratis tidaklah bersifat tetap. Teks-teksnya tidak membolehkan atau melarang sesuatu secara mutlak, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan tanggung jawab pribadi. Semua itu didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan yang selalu berkembang. Padahal sudah diketahui bahwa kepentingan dan kebutuhan itu selalu berganti dan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Bukan suatu hal yang aneh dalam sejarah hukum-hukum positif buatan manusia, bahwa hukum yang terakhir akan bertentangan dengan hukum yang pertama dalam rincian-rinciannya. Demikian pula yang dibenci dapat berubah menjadi disukai, yang dilarang dapat berubah menjadi boleh, dan yang ganjil dapat berubah menjadi wajar."

Ulama-ulama Islam yang mengkritik demokrasi yang kafir antara lain adalah Dr. Fathi Ad Darini, salah seorang ulama besar dalam fiqih siyasah. Dalam kitabnya *Khasha`ish At Tasyri' Al Islami fi As Siyasah wa Al Hukm* halaman 370 Dr. Fathi Ad Darini berkata :

”Sesungguhnya sistem-sistem demokrasi Barat, dalam substansinya hanyalah merupakan ungkapan dari politik tersebut (sekularisme—penerj.) dan sudah diketahui bahwa demokrasi –pada asalnya— bersifat individualistis dan etnosentris.

Bahwa demokrasi bersifat individualistis, dikarenakan tujuan tertinggi demokrasi adalah individu dan pengutamaan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Sudah banyak koreksi-koreksi yang diberikan pada prinsip ini pada abad XX M.

Bahwa demokrasi bersifat etnosentris, dikarenakan demokrasi itu sendirilah yang telah melakukan penjajahan politik dan ekonomi dalam berbagai bentuknya sejak abad XV M sampai abad XX M. Dahulu Inggris misalnya mempunyai departemen yang bernama Departemen Wilayah Jajahan dan mempunyai pula menteri yang mengelola urusan-urusan penjajahan, yaitu Menteri Wilayah Jajahan. Hal ini masih ada hingga beberapa waktu yang lalu.

Demikianlah. Politik ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang ringkasnya adalah sebagai berikut :

1. Memisahkan politik dari morak dan agama, dan menegakkan politik di atas dasar prinsip-prinsip khusus.
2. Etnosentrisme, yaitu paham bahwa manusia Eropa adalah manusia yang terunggul.
3. Menjadikan sistem perwakilan sebagai cara dalam mengatur pemerintahan.
4. Menerapkan prinsip “kebebasan umum/masyarakat” dalam pengertiannya yang individualistis, tradisional, dan absolut.
5. Kebebasan ekonomi, sebagai cabang dari kecenderungan prinsip individualisme yang ekstrem.
6. Sesungguhnya demokrasi politik adalah sistem yang membiarkan, bukan sistem yang meluruskan. Artinya demokrasi mendekati mayoritas rakyat dengan membiarkan mereka dalam keadaan apa adanya dan memperlakukan mereka mengikuti asas ini atas nama kebebasan.”

Syaikh Abul A’la Al Maududi dalam kitabnya *Al Islam wa Al Madaniyah Al Haditsah* halaman 36 mengatakan :

“Telah saya katakan sebelumnya bahwa pengertian demokrasi dalam peradaban moderen adalah memberikan wewenang membuat hukum kepada mayoritas rakyat

(*hakimiyah al jamahir*). Artinya, individu-individu suatu negeri dapat secara bebas mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat dan bahwa undang-undang negeri ini mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian juga tujuan dari pembentukan pemerintahan –dengan bantuan struktur organisasinya dan potensi-potensi materilnya— bukanlah untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat, berkebalikan dengan apa yang seharusnya diwujudkan...

Maka dari itu, kita menentang sistem sekuler yang nasionalistis-demokratis baik yang ditegakkan oleh orang-orang Barat maupun Timur, muslim ataupun non muslim. Setiap kali bencana ini turun dan di mana pun dia ada, maka kita akan mencoba untuk menyadarkan hamba-hamba Allah akan bahayanya yang besar dan akan mengajak mereka untuk memeranginya."

Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya *Nizham Al Hukm fi Al Islam* halaman 245 berkata :

"Sesungguhnya sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem demokrasi, baik dalam pengertiannya menurut kaum Yunani kuno maupun dalam pengertiannya yang moderen."

Muhammad Asad dalam kitabnya *Minhaj Al Islam fi Al Hukm* halaman 52 mengatakan :

"Adalah merupakan penyesatan yang sangat luar biasa, jika ada orang yang mencoba menerapkan istilah-istilah yang tidak ada hubungannya dengan Islam pada pemikiran dan peraturan/sistem Islam."

Utsman Khalil, meskipun telah menulis kitab yang diberinya judul *Ad Dimuqrathiyah Al Islamiyah* (Demokrasi Islami), namun sebenarnya dia sendiri menentang demokrasi. Utsman Khalil berkata dalam kitab *Ad Dimuqrathiyah Al Islamiyah* halaman 8 :

"Sesungguhnya sistem-sistem demokrasi modern yang diimpor dari Barat, di negara-negara Barat sendiri dianggap sebagai hal baru yang diada-adakan pada abad ke-20 ini."

Jadi demokrasi adalah bid'ah dalam hal pemikiran dan politik yang diimpor dari Barat.

Di antara sedikit pemikir yang membongkar perbedaan-perbedaan substansial antara demokrasi dan sistem politik Islam adalah Anwar Al Jundi. Karena pentingnya, kami kutipkan secara panjang lebar pendapatnya dalam kitabnya *Sumum Al Istisyraq wa Al Mustasyriqun fi Al Ulum Al Islamiyah* halaman 96. Anwar Al Jundi mengatakan :

"Pemikiran politik Islam berbeda dengan pemikiran demokrasi Barat dalam beberapa segi :

1. Pemikiran politik Islam lebih menekankan kesatuan aqidah daripada kesatuan wilayah.
2. Pemikiran politik Islam menekankan pandangan yang menghimpun secara sempurna aspek yang material dan yang spiritual.
3. Pemikiran politik Islam bersandar pada landasan akhlaq (moral). Jadi terdapat standar moral bagi setiap aktivitas politik.
4. Jika kedaulatan dalam sistem demokrasi Barat terletak di tangan rakyat secara total, maka umat Islam dalam pemikiran politik Islaminya mengaitkan kedaulatannya dengan hukum-hukum Syariat Islam yang jauh dari hawa nafsu manusia.
5. Pemikiran politik Islam tidak dapat dinamakan sebagai pemikiran demokratis, atau pemikiran sosialistis-diktatoris. Sebab ia bertolak belakang dengan semua pemikiran itu. Jadi pemikiran politik Islam sangat jauh dari sikap ekstrem, memaksa, atau mendominasi.
6. Kedaulatan dalam sistem politik Islam bukanlah di tangan umat --seperti sistem demokrasi-- juga bukan di tangan kepala negara --seperti sistem kediktatoran--, melainkan ada dalam penerapan Syariat Islam. Dengan demikian sistem politik Islam sangat jauh berbeda dengan sistem apa pun yang telah menyimpang itu.
7. Pemikiran politik Islam menetapkan bahwa masyarakat itu penting demi untuk kelestarian kehidupan individu, dan bahwa masyarakat tidak mungkin berjalan dengan lurus kecuali dengan adanya kekuasaan yang bertanggung untuk mewujudkan kemajuan dan kestabilan.
8. Negara dalam pemikiran politik Islam berdiri di atas dasar Undang-Undang Islami (Syariah) dan bahwa segala perundang-undang yang digunakan untuk

mengatur masyarakat tidak akan dapat berlaku efektif kecuali bila mempunyai sifat sebagai penerapan dari As Sunnah An Nabawiyah dan ijtihad-ijtihad Ahlul Halli wal Aqdi. Negara harus mengawasi perilaku individu sebab negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan pihak lain serta kebahagiaan dan kesatuan umat seluruhnya. Negara juga bertanggung jawab menjaga ajaran-ajaran dan tujuan-tujuan Islami.

9. Islam tidak mengakui adanya penguasa yang absolut. Sebaliknya yang diakui adalah penguasa yang dapat dipercaya (amanah) sesuai pedoman :

   "Tidak ada ketaatan kepada makhluk (manusia) dalam maksiat kepada Al Khalik."

   Penguasa harus melepaskan diri dari hawa nafsu, berpegang teguh dengan kebenaran dan keadilan. Umat mempunyai kebebasan untuk memilih penguasa dan mengoreksinya jika penguasa menyimpang dari kebenaran atau berbuat salah.

10. Pemikiran politik Islam menetapkan adanya kebebasan berpikir dan kebebasan beragama. Maka setiap orang --tentu harus tetap sesuai Syariat Islam— berhak untuk meyakini pemikiran apa saja yang dikehendaki dan tak ada seorang pun yang dapat memaksanya untuk meninggalkan pemikirannya itu.
11. Sistem konstitusi Islam diambil dari sumber Al Qur`anul Karim dan As Sunnah An Nabawiyah dengan tiga asas, yaitu keadilan, musyawarah, dan rahmah (kasih sayang). Dalam hubungannya dengan undang-undang internasional, Al Qur`an Al Karim dipandang sebagai hukum pertama yang menyerukan persamaan di antara umat manusia.
12. Sesungguhnya keluwesan Syariat Islam dan kemungkiannya untuk berkembang, harus tetap berpegang pada dasar-dasar syariat (*ushul syar'iyah*), tujuan-tujuan syariah (*maqashid asy syariah*), dan prinsip-prinsip umum syariah (*kulliyatu asy syariah*). Jadi jelas ada perbedaan antara yang konstruktif dan yang destruktif, antara perkembangan dengan penyesuaian (dengan hawa nafsu). Tidak diragukan lagi bahwa ada bagian dari hukum-hukum Syariat Islam yang tidak menerima perkembangan dan bahwa hukum yang telah ditetapkan dalam nash tidak boleh ditinggalkan atau diganti penerapannya sampai kapan pun. Jadi pemeliharaan terhadap kemaslahatan

bukanlah perkara yang tidak mempunyai batasan, melainkan harus tetap berpatokan dengan dasar-dasar syariat (*ushul syar'iyah*). Secara umum dapat dikatakan bahwa jika dalam suatu hukum terdapat nash, maka nash itu wajib diikuti. Jika hukum itu berupa perkara yang diqiyaskan (pada suatu hukum), maka kita terikat dengan qiyas itu. Tetapi jika tidak terdapat nash, kita mempertimbangkan kemaslahatan yang ditunjukkan syara' (*mashalih asy syar'i*) dengan tetap berpegang pada prinsip memelihara lima tujuan syariat yang *dharuri* (penting, harus) (*dharurat al khams*), menolak kesulitan (*daf'ul haraj*), dan mewujudkan manfaat (*tahqiq al manafi'*).

13. Sistem politik Islam berbeda dengan dengan dua sistem politik lainnya, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sebab sistem kapitalisme membatasi tujuannya pada pemeliharaan kebebasan individu dan hak-hak pribadi, sedang sistem sosialisme membatasi tujuannya pada pencegahan perjuangan kelas dan ekspolitasi kelas.
14. Pemikiran politik Islam tidak memberikan hak/otoritas dalam kekuasaan kepada penguasa, tetapi sebaliknya kekuasaan dianggap sebagai hak umat semata melalui syura yang Islami oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Islam tidak melarang perempuan untuk turut berpendapat dalam masalah-masalah umum (publik). Namun Islam mengharamkan budak untuk berperan serta dalam menyampaikan pendapat dan bermusyawarah.
15. Pemikiran politik Islam menolak istilah-istilah demokrasi, sosialisme, nasionalisme, dan tidak mengkaitkannya dengan Islam. Islam memandang pemikiran-pemikiran itu sebagai aliran-aliran pemikiran (mazhab) yang asing yang sangat jelas perbedaannya dengan pemikiran Islam yang komprehensif. Ketika Barat menggunakan istilah-istilah itu, yang hadir dalam benak mereka adalah peristiwa-peristiwa sejarah Barat, situasi dan kondisi yang terjadi di Barat, dan tantangan-tantangan yang dihadapi Barat.
16. Perbedaan sifat-sifat khas antara negara Islam dan negara moderen akan mengungkapkan adanya sistem unik yang khas bagi negara Islam, yang tidak terdapat dalam sistem mana pun dari sistem-sistem pemerintahan moderen. Pilar utama negara Islam adalah pengkaitan agama dengan negara
17. Perjanjian (kontrak) politik Islam adalah kesepakatan politik antara penguasa dengan rakyat. Perjanjian politik dalam Islam didasarkan pada pemikiran-pemikiran dasar yang merdeka, yang tidak kalah pentingnya dengan

pemikiran-pemikiran politik moderen, yaitu yang terpenting adalah kemerdekaan untuk memilih (dari pihak rakyat), dan kesepakatan dari pihak penguasa (atau khalifah) untuk memegang kekuasaan sebagai wakil dari umat. Dari sini diketahui bahwa teori perjanjian politik Islam sebenarnya mendahului teori-teori J.J.Rousseau dan John Locke.

DEMOKRASI JALAN MENUJU KEBEJATAN MORAL

Tidak ada keraguan lagi bahwa di antara sebab kehancuran berbagai peradaban adalah kemerosotan moral. Pada poin ini saya tidak ingin berbicara panjang lebar sebab saya sedang menyiapkan tulisan panjang yang membahas pengaruh kemerosotan moral terhadap kehancuran berbagai peradaban di masa dahulu maupun sekarang. Cukuplah saya nyatakan bahwa demokrasi Barat yang bejat itu sebenarnya telah membawa benih-benih kerusakan dan kebejatan moral. Kenyataan yang ada adalah bukti yang paling jelas untuk itu. Jika tidak demikian, bagaimana kita bisa menafsirkan mengapa para pemuda dan masyarakat umum di Eropa menerima kehadiran narkoba dengan berbagai jenisnya. Bagaimana pula kita bisa menafsirkan tenggelamnya mereka dalam kebejatan perilaku seksual yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia yang panjang. Lihatlah bagaimana parlemen Inggris telah membolehkan pernikahan sesama lelaki dan juga pernikahan sesama perempuan. Pernikahan dengan sesama kerabat dekat/mahram (*incest*) juga banyak terjadi sampai tak terhitung lagi. Semua ini dilakukan dengan kedok kebebasan individu yang absolut. Jelaslah bahwa demokrasi adalah jalan menuju kebejatan moral. Jika tidak demikian, bagaimana pula kita bisa menafsirkan tersebarnya majalah-majalah porno, pergaulan bebas, kekerasan seksual, dan pemerkosaan. Apakah Aljazair mau terperosok ke jurang kebejatan moral seperti yang dialami Eropa atas nama pluralisme demokrasi ini ?

Yang jelas, kita semua sudah sampai pada suatu masa kehancuran moral yang sulit dilukiskan lagi. Dan kita tak akan dapat kembali kepada kebaikan moral kecuali dengan segera melakukan *taubat nasuha* serta memotong benih-benih dan sebab-sebab kerusakan, seperti pergaulan pria-wanita yang campur aduk (*ikhtilath*), film-film selera rendah, lagu-lagu seronok, majalah-majalah cabul, dan karya-karya sastra bejat yang dapat kita sebut sebagai sastra “ranjang”.

DEMOKRASI ADALAH SEBUAH TIPE KEDIKTATORAN

Mungkin ada orang yang menduga bahwa ketika saya menghantam demokrasi dengan keras seperti ini, berarti saya mendukung kediktatoran dan kesewenang-wenangan. Sebenarnya, saya ingkar terhadap keduanya. Saya telah menyusun tulisan-tulisan untuk kritik kediktatoran dan kesewenang-wenangan –ketika saya berada di penjara (...)— dengan judul yang dapat merangkum tulisan-tulisan tersebut, yaitu *Siham fi Kabid Al Haqiqah*. (Anak Panah pada Jantung Kebenaran). Saya ingkar terhadap kesewenang-wenangan sebagaimana saya ingkar terhadap demokrasi.

Akan tetapi, apa yang dilakukan negara yang mengklaim sebagai negara demokratis dan pelopor HAM tatkala mereka menjajah negeri-negeri kaum muslimin?

Apa yang dilakukan Inggris yang demokratis terhadap Mesir ? Apakah urusan dikembalikan kepada rakyat Mesir ataukah kepada moncong meriam ? Apa pula yang dilakukan Perancis yang demokratis di Aljazair, yang kini disembah-sembah oleh sebagian ketua partai politik Aljazair ? Apa yang dilakukan negara-negara demokratis tatkala menjajah Palestina, India, dan Asia ? Apa pula yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang demokratis di Vietnam ?

Negara-negara yang mengklaim demokratis ini sungguh telah menghancurkan berbagai bangsa. Negara-negara itu telah merobek-robek perut dan menghisap darah berbagai bangsa. Pembantaian-pembantaian ala demokrasi tak kurang banyaknya dibandingan pembantaian-pembantaian ala komunisme, kalaupun tak bisa dikatakan lebih jahat. Hanya saja memang ada beda di antara keduanya, yaitu demokrasi membunuh dengan racun dalam gelas yang indah atau dengan benang dari sutera.

Syaikh Muhammad Al Ghazali berkata dalam kitabnya *Min Huna Na'lam* halaman 93, ketika beliau membantah Khalid Muhammad Khalid yang mengklaim keutamaan pemerintahan demokratis :

"Adalah perkara yang haq, bahwa orang-orang yang menerapkan demokrasi sebagai sesuatu yang ideal, hakikatnya adalah orang-orang yang lebih rendah moralnya dan lebih buruk pengaruhnya dibandingkan orang-orang yang menyalahgunakan agama, pada saat mereka menerapkan hukum-hukum yang zalim. Mari kita lihat sekilas sistem demokrasi ketika diterapkan di negeri kita (Mesir-penerj.) di tangan tuan-tuannya dari penduduk Eropa yang menjadi utusan Eropa atau yang menjajah kita. Sesungguhnya generasi yang dibentuk oleh Perancis setelah Revolusi Perancis,

menjadi besar di buminya sedang mereka mendengar slogan-slogan, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*). Generasi inilah yang telah menghancurkan berbagai hambatan dan ikatan serta telah menghancurkan benteng-benteng kezaliman yang dibangun oleh para raja. Generasi ini lalu datang ke timur untuk membuat penduduknya menjadi miskin dengan cara yang lebih kejam dan keras bila dibandingkan dengan apa dilakukan oleh raja-raja Perancis yang zalim.

Kejahatan penjajahan Perancis dan kekejamannya tetap ada pada memori kita –kaum muslimin-- tidak akan pernah berhenti sampai akhir masa.

Demikian pula orang-orang Inggris, Italia, dan akhirnya Amerika Serikat. Negara-negara demokratis dalam politik internasionalnya bersepakat untuk menggoncangkan segala prinsip-prinsip keadilan dan kemuliaan yang dimiliki berbagai bangsa di dunia.

Segala gerakannya baik yang lembut maupun kasar ditujukan untuk memuaskan syahwat dan kebutuhan yang mereka sembunyikan. Tidak pernah tercatat dalam sejarah lembaga-lembaga yang dibentuk negara-negara demokratis, lahir satu keputusan yang motif dan tujuannya dapat dianggap murni, khususnya jika keputusan ini berkaitan dengan Islam dan kaum muslimin.

Jika Presiden Truman menduga bahwa ia dapat memaksa dunia menerima satu tipe demokrasi seperti yang dijalankan Amerka Serikat, maka sungguh ia telah salah besar. Seluruh dunia sebenarnya tidak mau menerima sebuah kediktatoran yang nista yang diberi kedok luar (sehingga tertutup keburukannya), yang disebut demokrasi." (Selesai perkataan Syaikh Muhammad Al Ghazali).

PARTAI-PARTAI DEMOKRATIS ALJAZAIR MENJALANKAN KEDIKTATORAN ATAS NAMA DEMOKRASI

Setelah kemenangan FIS dalam Pemilu 12 (...) partai-partai sekuler yang tak mau menerima kekalahan merasa bahwa mereka ada dalam keadaan bahaya dan bahwa bangsa Aljazair adalah bangsa muslim yang konsisten, meskipun mereka melakukan beberapa kemaksiatan. Mereka merasakan pula bahwa mustahil membeli aqidah bangsa Aljazair dengan harga yang murah. Maka mereka lalu bertindak melampaui batas dalam menakwilkan rahasia kemenangan FIS serta mencap FIS dengan segala macam perkataan yang buruk dan menyakitkan. Dalam hal ini kami berdiam diri karena mengamalkan firman Allah SWT :

"Dan jika orang-orang jahil (bodoh) menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." (QS Al-Furqaan [25] : 63)

Kami memohon kepada Allah agar menerima taubat kami dan taubat mereka sampai kami dapat mendirikan negara Islam yang kuat.

Untuk menentang kemenangan FIS ini, muncul persekutuan-persekutuan yang bermaksud melindungi demokrasi dengan dalih bahwa demokrasi ada dalam bahaya. Persekutuan-persekutuan yang bermacam-macam ini menyatakan bahwa mereka ingin menghambat laju FIS. Yang lainnya menyatakan"hendak menghalangi dominasi gerakan fundamentalisme di masyarakat Aljazair, hendak mengoreksi kemenangan fundamentalisme, dan hendak melemparkan undang-undang keluarga (Syariat Islam) ke dalam tempat sampah." Yang menjadi pedoman mereka dalam hal ini adalah pernyataan salah seorang menteri Italia dalam sebuah sidang Organisasi Pasar Bersama Eropa mengenai pentingnya memberi perhatian khusus dalam masalah bantuan-bantuan keuangan untuk negeri-negeri Maroko-Arab guna melawan kaum fundamentalis.

Pertanyaan yang ada di hadapan masyarakat umum adalah, mengapa berbagai kelompok dan persekutuan ini muncul persis setelah kemenangan FIS ? Mengapa tidak muncul sebelumnya ? Jadi apakah itu ditujukan untuk menentang penguasa yang zalim atau menentang gerakan Islam yang hendak mendirikan negara Al Qur`an dan As Sunnah semata –bukan yang lain-- di bumi para syuhada ini ? Mengapa mereka

tidak bersatu sebelum pemilihan umum untuk menjatuhkan kekuasaan ? Jawabannya saya serahkan pada opini masyarakat. [ ]